

DAFTAR PUSTAKA

- Affan, J. M., Siregar, M. S. R., Rizqi, R., & Ritanto, E. P. (2022). Strategi Meningkatkan Kesadaran Hukum Nelayan Terhadap Penggunaan Kompresor Sebagai Alat Bantu Penangkapan Ikan di Ujung Pancu. *Jurnal Kelautan Dan Perikanan Indonesia*, 2(2), 92–108.
- Amura, D., & Pirhel, P. (2021). Analisis Finansial Usaha Perikanan Tangkap Di Teluk Ambon Luar Sebagai Upaya Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan. *TRITON: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan*, 17(1), 46–56. <https://doi.org/10.30598/tritonvol17issue1page46-56>
- Aneng, R. J., Barkey, R. A., Studi, P., Wilayah, P., Pascasarjana, S., & Hasanuddin, U. (2021). (*STUDI KASUS PULAU MANTEHAGE*) *ANALYSIS OF TENURIAL CONFLICT OF THE BUNAKEN NATIONAL PARK 1 (A CASE STUDY OF MANTEHAGE ISLAND)*. 47–57. <https://doi.org/10.20886/jwas.v8i1.6175>
- ANUGRAH UTAMA, R. (2019). *PERAN LOCAL STRONGMAN PADA KONTESTASI POLITIK (Studi Terhadap Kemenangan Agus Sudrajat Pada Pilkades Desa Sinagar, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya)*. Universitas Siliwangi.
- Asri, M., Wahyuni, E. S., & Satria, A. (2019). PRAKTIK PERIKANAN DESTRUKTIF (Studi Kasus pada Taman Nasional Taka Bonerate). *Jurnal Sosiologi Pedesaan, Puspito 2010*, 25–33.
- Atmaja, S. B., & Nugroho, D. (2017). Upaya-upaya pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 3(2), 101–113.
- Doni, L., & Suraya, A. A. (2021). *Indonesian Journal of Anthropology Perjuangan Pengakuan Hak Kelola Lahan bagi Pengungsi Aceh di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser*. 6(September).
- Fuad, F. H., & Maskanah, S. (2000). *Inovasi penyelesaian sengketa pengelolaan sumber daya hutan*. Lembaga Alam Tropika Indonesia.
- Gaventa, J. (2006). Finding the spaces for change: a power analysis. *IDS Bulletin*, 37(6), 23–33.
- Goodwin, H. (2002). Local community involvement in tourism around national parks: opportunities and constraints. *Current Issues in Tourism*, 5(3–4), 338–360.
- Handoko, D. K. D., Fitriyana, F., & Susilo, H. (2022). KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI HUBUNGAN PATRON KLIEN PADA MASYARAKAT

NELAYAN PURSE SEINE DI KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN KOTA BONTANG. *Jurnal Perikanan Unram*, 12(3), 408–417.

- Hartono, M. S., & Hariyanto, D. R. S. (2018). Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perikanan Di Kecamatan Nusa Penida Study Of Criminology Towards Fishery Criminal Act In Nusa Penida Sub-District. *Kertha Wicaksana*, 12(1), 11–21.
- Kadir W, A., M, N., & Purwanti, R. (2013). Konflik Pada Kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Provinsi Sulawesi Selatan Dan Upaya Penyelesaiannya. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 10(3), 186–198. <https://doi.org/10.20886/jsek.2013.10.3.186-198>
- Kehutanan, K. L. H. dan. (2018). *Perdirjen No 6 Tahun 2018 tentang Juknis Kemitraan Konservasi.pdf*.
- Kehutanan, P. M. (2006). *Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 56/Menhut-II/2006 Tentang Zonasi Taman Nasional Menteri Kehutanan*. Jakarta.
- Kementerian LHK, D. K. (2020). *Statistik Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020*. Ditjen KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Kusworo. (2019). *Manajemen Konflik dan Perubahan dalam organisasi* (W. A. Adnan (ed.); Pertama). Alqaprint.
- Mardiyanto A. (2015). *Konflik Sumber Daya Alam Laut Di Perairan Taman Nasional Karimun Jawa (Studi Kasus Konflik Antara Nelayan Dengan Balai Taman Nasional Karimunjawa)*. Universitas Gadjah Mada.
- Marina, I., Dharmawan, H., Sains, D., Masyarakat, P., & Manusia, F. E. (2011). *KONSERVASI Analysis of Resource Forest Conflict in Conservation Area*. 05(01), 90–96.
- Miall, H. (2004). Conflict transformation: A multi-dimensional task. In *Transforming ethnopolitical conflict* (pp. 67–89). Springer.
- Pemerintah RI. (1990). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. *UNDANG-UNDANG Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*, 1–28. <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/602.pdf>
- Pemerintah RI. (2009). *Undang Undang No 45 tahun 2009 tentang Perikanan*. 2, 1–8.
- Pranajaya, A. (2017). *PRIDE CAMPAIGN LEARNING REPORT TERRITORIAL USE RIGHTS FOR FISHERIES RESERVES (TURF-R) PROGRAM IN TAKA*

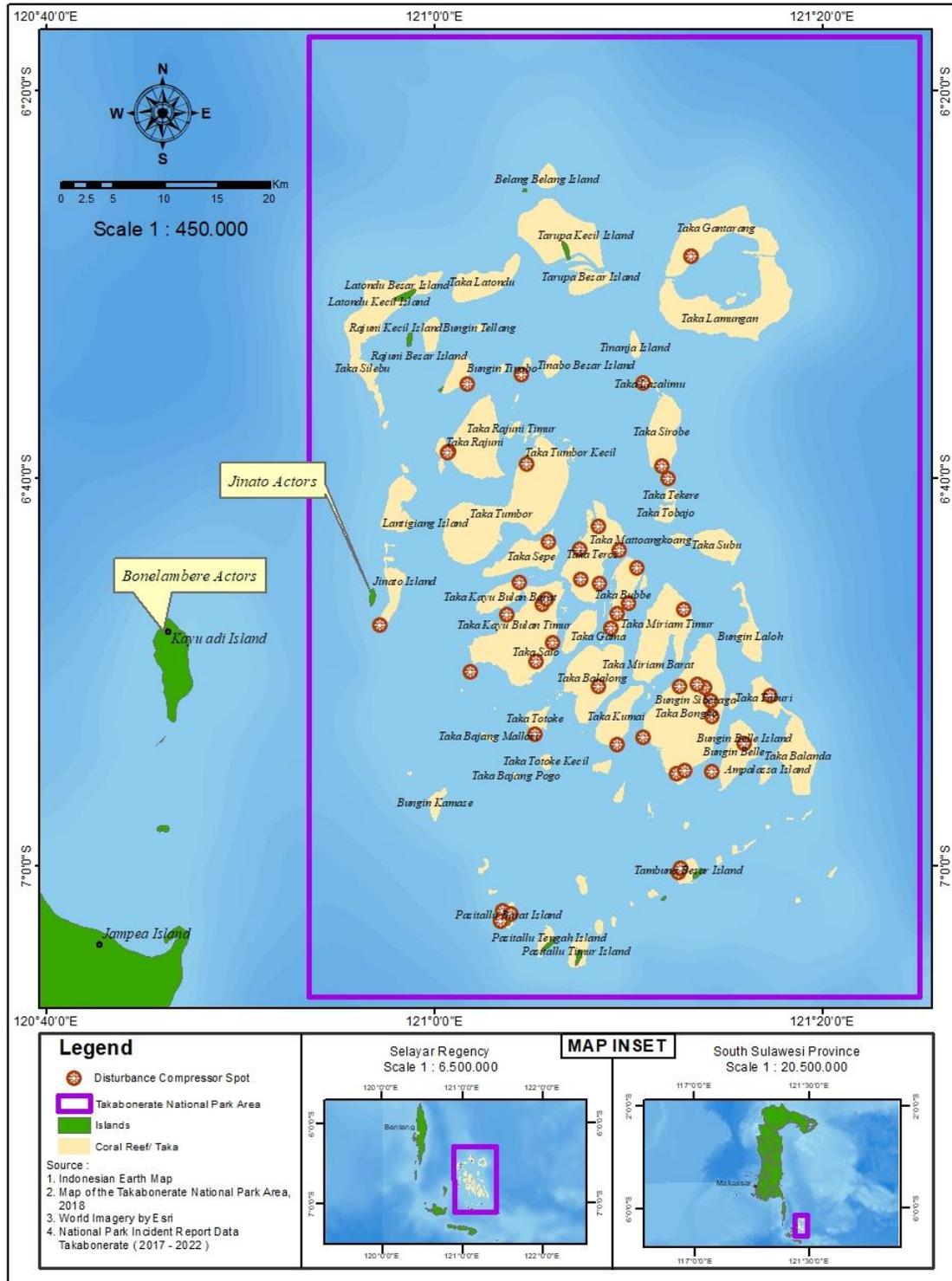
DANGKA - SILEBU.

- Prayitno, D. E. (2020). Kemitraan konservasi sebagai upaya penyelesaian konflik tenurial dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(2), 184–209.
- Purwawangsa, H. (2018). Instrumen Kebijakan Untuk Mengatasi Konflik Di Kawasan Hutan Konservasi. *RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN: Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian Dan Lingkungan*, 4(1), 28. <https://doi.org/10.20957/jkebijakan.v4i1.20059>
- Rahayu, K. I., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Ditinjau Dari Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 145–155.
- Sahide, M. A. K., Sirimorok, N., Batiran, K., Fisher, M., Verheijen, B., Sulu, M. N., Faturachmat, F., Supratman, S., & Maryudi, A. (2021). Actor-center framing on measuring land use conflict visibility. *MethodsX*, 8. <https://doi.org/10.1016/j.mex.2021.101450>
- Sambali, H., Pamikiran, R. D. C., & Labaro, I. L. (2023). PEMBERDAYAAN NELAYAN PENGGUNA KOMPRESOR SEBAGAI ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN DI DESA SIMUENG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. *VIVABIO: Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 5(1), 6–12.
- Sembiring, E., Basuni, S., & Soekmadi, R. (2010). Resolusi Konflik Pengelolaan Taman Nasional Teluk Cenderawasih di Kabupaten Teluk Wondama. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 16(2), 84–91.
- Senoaji, G., Hidayat, M. F., & Iskandar, I. (2020). RESOLUSI KONFLIK TENURIAL PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG RIMBO DONOK KABUPATEN KEPAHİYANG (The Tenurial Conflicts Resolution of Utilization of Forest Areas in Protected Forests Rimbo Donok Kepahiang District). *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, 26(1), 28. <https://doi.org/10.22146/jml.29250>
- Setiawan, E. (2022). KONFLIK PADA KAWASAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DAN SOLUSI PENYELESAIANNYA. *Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh*, 3, 286–297.
- Speakman, J., & Ryals, L. (2010). A re-evaluation of conflict theory for the management of multiple, simultaneous conflict episodes. *International Journal of Conflict Management*.
- Sukarman. (2018). Partisipasi Masyarakat Mitra Polhut pada Upaya Perlindungan dan Pengamanan Hutan di Taman Nasional Way Kambas. *Jurnal Sylva Lestari*, 6(1),

85–98.

- Susandi, L. A., Purnomo, E. P., & Ridho, A. (2021). Perlindungan Ekosistem Melalui Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Taman Nasional Gunung Merapi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 26(1), 111–122.
- Syaf, H., Sudia, L. B., Mursidi, B., & Yasin, A. (2022). PENYELESAIAN POTENSI KONFLIK KEPENTINGAN MASYARAKAT KABUPATEN KOLAKA TIMUR DENGAN TAMAN NASIONAL RAWA AOPA WATUMOHAI PORVINSI SULAWESI TENGGARA. *Publicuho, Journal*, 5(4), 1041–1060.
- Syamsibar, S. (2022). Manajemen Konflik dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Organisasi. *JURNAL SIPATOKKONG BPSDM SULSEL*, 3(1), 1–14.
- Taka Bonerate, B. T. (2018). Laporan Gangguan Kawasan TN Taka Bonerate Tahun 2018. In *Laporan*.
- Taka Bonerate, B. T. (2020). *Laporan Evaluasi Kemitraan Konservasi TN Taka Bonerate 2020*.
- Wiratno. (2018). Sepuluh Cara baru Kelola Kawasan Konservasi di Indonesia: Membangun “Organisasi Pembelajar.” In *Direktorat Jenderal KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. http://ksdae.menlhk.go.id/assets/publikasi/10_Cara_Baru_Kelola_KK.pdf
- Wirawan, W. (2009). Konflik dan manajemen konflik: Teori, aplikasi, dan penelitian. *Jakarta: PT Bumi Aksara*.
- Yusran, Y., Sahide, M. A. K., Supratman, S., Sabar, A., Krott, M., & Giessen, L. (2017). The empirical visibility of land use conflicts: From latent to manifest conflict through law enforcement in a national park in Indonesia. *Land Use Policy*, 62, 302–315.

Lampiran 1. Peta lokasi penelitian, domisili komunitas dan lokasi gangguan kompresor



Lampiran 2. Dokumentasi wawancara dengan pengelola TN Taka Bonerate



Gambar 1. Responden Ka Balai TN TBR. Gambar 2. Responden KaSPTN 1 Tarupa



Gambar 3. Responden Koordinator Penyuluh. Gambar 4. Responden Kares Tinabo



Gambar 5. Responden Polhut

Gambar 6. Responden Koordinator Polhut

Lampiran 3. Dokumentasi wawancara dengan komunitas Bonelambere dan Jinato



Gambar 1. Pemodal Bonelambere.



Gambar 2. Pemodal Jinato



Gambar 3. Responden Juragan Kapal



Gambar 4. Responden nelayan



Gambar 5. Responden Juragan kapal



Gambar 6. Responden nelayan

Lampiran 4. Kompresor, aksi demonstrasi dan aksi penolakan nelayan tradisional



Beberapa mesin kompresor yang masih berada di gudang Balai TN Taka Bonerate.



Demonstrasi oleh Aliansi peduli nelayan dan diskusi di gedung DPRD, 2019.



Aksi Penolakan nelayan kompresor dilakukan nelayan tradisional di dalam kawasan (Konflik Horizontal) Februari 2022.

Lampiran 5 . Undangan rapat di DPRD membahas aspirasi masyarakat Bonelambere



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**
Jln. Jend. Achmad Yani No.1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Tlp. (0414) 21714, Fax. (0414) 21829

Benteng, 19 Oktober 2018

Nomor : 005/ 410/DPRD/X/2018
Lamp. : -
Perihal : Undangan Rapat

Kepada
Yth. Kepala Balai Taman Nasional
Takabonerate

Di-
Benteng

Berdasarkan permintaan Pimpinan Komisi II DPRD, dengan ini disampaikan bahwa akan dilaksanakan Rapat Kerja Komisi II dengan Pihak Eksekutif, yang Insha Allah dilaksanakan pada :

Hari/ tanggal : Senin, 22 Oktober 2018
Waktu : Jam 11.00 Wita - selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi II (Lantai II)
Agenda : Menindak lanjuti aspirasi masyarakat Desa Nyiur Indah tentang pelarungan alat bantu kompresor .

Berkenaan dengan maksud tersebut, diharapkan kiranya dapat menghadirkan Pejabat Eksekutif tersebut dibawah ini untuk mengikuti rapat sesuai jadwal

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

WAKIL KETUA


MUHAMMAD ARIS RIDWAN, SE

Catatan : Pakaian PSH

Lampiran 6. Aspirasi penolakan masyarakat Pasitallu Timur(nelayan dalam kawasan) tentang penggunaan kompresor tanggal 26 Oktober 2021.

ASPIRASI MASYARAKAT DESA KHUSUS PASITALLU
TENTANG PENLAKSAN ALAT TUKANG PANAH YANG MEMPUNYAI
ALAT BANTU KOMPRESOR YANG SUDAH SANGAT MERUSAKAN/
MENGANGGAP DI NECAHAK COKAL
MELAKUKI JAJTRA NECAHAK YANG MENDEK:

NO	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	TANDA TANGAN
1	SAFRI	Desa UTARA	MANSUR	---
2	SOEBA	Desa UTARA	MALIKUS	2
3	BEKRI SURBANI	Desa UTARA	NECAHAK PMS	---
4	Ketaman	Desa UTARA	Nelayan	4
5	TARNO	Desa UTARA	PANAH	---
6	MUH. YUNUS	Desa UTARA	KAPUS	6
7	Jacruddin	---	Nelayan	7
8	IKSAR	Desa UTARA	Nelayan PANAH	8
9	ANSAR	Desa UTARA	Nelayan PANAH	9
10	Rafaelita	Desa UTARA	P.P. PANAH	10
11	PANJI	Desa UTARA	NECAHAK PANAH	---
12	MANA GAZALI	Desa UTARA	NECAHAK PANAH	12
13	BESKI TARIK	Desa UTARA	Nelayan PANAH	13
14	SUPRADI	Desa UTARA	Nelayan PANAH	14
15	MULINDI	---	---	15
16	LINAH	---	---	16
17	LIBOM	---	---	17
18	AD	---	---	18
19	BARRO	---	---	19
20	MUH. HADI	---	---	20
21	DANI	---	---	21
22	HERJAN	Desa UTARA	---	22
23	AHMAD	Desa UTARA	---	23
24	Abdullah	---	---	24
25	CIUDAN	---	---	25
26	KATI LANSO	Desa UTARA	---	26
27	BRIGIR	---	---	27
28	HENDRA	Desa UTARA	---	28
29	TROKIS	Desa UTARA	---	29
30	BOBO	Desa UTARA	---	30
31	MARLAN	---	---	31
32	MUWA ANJUNG	Desa UTARA	NECAHAK	32

NO	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	TANDA TANGAN
33	SAMBA	Desa UTARA	Nelayan	33
34	GALI BR	Desa UTARA	Nelayan	34
35	SUNTAR	Desa UTARA	Nelayan PANAH	35
36	KUARDIN	---	---	36
37	PIPIKIS	---	---	37
38	USMAN	---	---	38
39	RESEI	---	---	39
40	ABAP	---	---	40
41	Amir	Desa UTARA	Nelayan	41
42	Sofyan Hojir	Desa UTARA	---	42
43	M. JUBAR	---	---	43
44	Dasatrat	---	---	44
45	Amir	---	---	45
46	Laqmal	---	---	46
47	Ismael	Desa UTARA	---	47
48	Fahmi	---	---	48
49	Kamal	---	---	49
50	DANSO	---	---	50
51	SAKRI	---	---	51
52	Carita	---	---	52
53	MAMING	Desa UTARA	---	53
54	ASIR	Desa UTARA	---	54
55	ISRAEL	---	---	55
56	FIRMAN	---	---	56
57	DAZEL	Desa UTARA	Nelayan PANAH	57
58	NABIL	---	---	58
59	ESWAR	---	---	59
60	YUSUF	---	---	60
61	ALDI	---	---	61
62	SERADI	Desa UTARA	---	62
63	DEWA	Desa UTARA	Nelayan PANAH	63
64	ADIPRA	---	---	64
65	ARHAM	Desa UTARA	---	65
66	ASEIN	---	---	66
67	YASRI	---	---	67
68	BULCONG	Desa UTARA	Nelayan PANAH	68
69	SUBHAN	Desa UTARA	Nelayan PANAH	69

Lampiran 7. Piagam Pa'jukukang tentang pemberantasan *Illegal fishing* dan *Destructive Fishing*



Lampiran 8 : Hasil wawancara 1, komunitas Bonelambere
 Nama : Wahid Bin Mangung
 Umur : 45 Tahun
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Peranan : Pemodal

1. Bagaimana pandangan anda tentang kawasan Taman Nasional Taka Bonerate bagi masyarakat nelayan?

Jawaban :

Cukup baik semuanya dengan adanya kawasan, masyarakat juga bisa mencari hasil yang lebih maksimal karena disana banyak ikannya.

2. Mengapa menggunakan alat bantu compressor dalam penangkapan ikan?

Jawaban :

Karena alat bantu kompressor murah dapat dibeli. Menggunakan kompressor dapat digunakan dilaut yang dalam dan lebih lama dengan hasil yang lebih banyak. Sebenarnya kalau ada Scuba lebih bagus lagi cuman mahal.

3. Apakah nelayan/masyarakat menyadari bahwa mereka berada dalam konflik?

Jawaban :

Masyarakat menyadari konflik, secara garis besar menyadari bahwa penggunaan kompressor tidak dibolehkan oleh Undang-undang. Tetapi pihak Jagawana juga tidak bisa menjelaskan bahwa penggunaan kompressor merusak lingkungan dan pihak jagawana juga tidak bisa memberikan solusi.

4. Apakah masyarakat memahami dinamika konflik yang melibatkan mereka?

Jawaban :

Menyadari akan panjang tapi saat ini juga jagwana ketika ada pelaku yang ditangkap tidak pernah selesai itu kasus dan pihak Balai juga tidak menelusuri itu kasusnya. Saya maunya itu di proses, supaya kita tau sampai dimana itu aturannya. Itu aturannya masih perlu dikaji itu aturannya. Jagawana cuman melakukan penangkapan dan tidak diproses, belum pernah ada pelaku compressor kasusnya sampai dipersidangan.

5. Apa saja tuntutan nelayan/masyarakat terhadap Balai TN Taka Bonerate/Pemerintah?

Jawaban:

Pernah kita menuntut sama pemerintah/balai agar membantu kami alat penangkapan ikan yang memadai. Yang sama dengan bantuan pengguna kompressor. Balai cuman mau kasih pukot tapi keahlian kami bukan disitu.

6. Bagaimana tanggapan masyarakat setelah mengetahui sikap dan/atau tindakan dari pemerintah?

Jawaban :

Kami kecewa dengan adanya aturan seperti itu karena pemerintah hanya melarang tapi tidak memberikan solusi.

7. Apa saja penyebab kegagalan nelayan untuk mengkalaim tuntutannya?

Jawaban:

Penyebab kegagalan klaim nelayan : pertama kami pernah minta di Bupati tapi Bupati terkendala di dana. Kami minta alat bantu yang ramah lingkungan tapi Bupati tidak sanggup, kami hanya diberi 1 set tapi tidak cukup karena kami banyak. Kalau ke Balai jawabannya Bukan wewenang kami memberikan solusi.

8. Siapa saja mitra/koalisi dari pihak nelayan dalam memenangkan aspirasinya?
Jawaban :
Kita hanya menggunakan Aliansi peduli nelayan yang dibentuk oleh nelayan. Kami tidak punya koalisi dengan yang lainnya.
9. Mengapa melibatkan pihak lain dalam memenangkan aspirasinya?
Jawaban : Tidak ada, sesama nelayan saja.
10. Siapa saja pihak yang membantu dari masyarakat/nelayan dalam proses resolusi konflik?
Jawaban : Tidak ada juga yang membantu Cuma kami-kami saja nelayan yang berembug untuk solusinya.
11. Dalam kapasitas apa pihak yang membantu proses resolusi konflik tersebut?
Jawaban : Tidak ada
12. Kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah/Balai TN Taka Bonerate dalam penanganan konflik?
Jawaban : Tidak ada, setahuku tidak ada.
13. Apa harapan/saran anda terkait dengan penanganan konflik?
Jawaban:
 - a. Untuk anggota Taman nasional Taka Bonerate terkait penegakan hukum agar lebih merata penegakan hukummnya. Penegakan hukum lebih merata.
 - b. Saya juga berterima kasih kepada Balai Taman Nasional Taka Bonerate karena mencegah terjadinya illegal fishing. Sedikit mencegah illegal fishing. Kalau tidak ada TN hancurmi itu kawasan.
 - c. Kalau ada pelanggaran agar pihak Balai tegas, anu gele kuat. Ampa menangkap anu gele natangkap orangnya sama kapalnya, jari gele kuat ampa bantu ri polisi.

Lampiran 9 : Hasil wawancara 2, komunitas Bonelambere

Nama : Maha

Umur : 45 Tahun

Pekerjaan : Nelayan

Peranan : juragan kapal

1. Bagaimana pandangan anda tentang kawasan Taman Nasional Taka Bonerate bagi masyarakat nelayan?

Jawaban : Tempat mencari kehidupan. Tidak bisa hidup tanpa Kawasan. Susah mencari kehidupan diluar Kawasan. Susah mencari pekerjaan lain.

2. Mengapa menggunakan alat bantu compressor dalam penangkapan ikan?

Jawaban : Tidak bisa bernafas lebih lama Ketika memaman ikan. Proses dalam mencari ikan lebih mudah dan cepat dibanding menggunakan alat lain walapun ongkosnya sangat banyak. Kalo pancing, prosesnya sangat lambat.

3. Apakah nelayan/masyarakat menyadari bahwa mereka berada dalam konflik?

Jawaban : Iya.

4. Apakah masyarakat memahami dinamika konflik yang melibatkan mereka?

Jawaban : Sangat memahami tetapi karena sudah terbiasa mencari dengan menggunakan compressor sehingga susah untuk beralih ke alat yang ramah lingkungan

5. Apa saja tuntutan nelayan/masyarakat terhadap Balai TN Taka Bonerate/Pemerintah?

Jawaban : Compressor bisa dijadikan alat bantu yang legal/bebas Ketika digunakan. Kami susah merubah pekerjaan untuk membiayai keluarga.

6. Bagaimana tanggapan masyarakat setelah mengetahui sikap dan/atau tindakan dari pemerintah?

Jawaban : Masyarakat menanggapi dengan melakukan aksi demo agar pemerintah mendengarkan keinginan mereka.

7. Apa saja penyebab kegagalan nelayan untuk mengkalaim tuntutannya?

Jawaban: Pemerintah tidak menanggapi aksi demo yang dilakukan (menutup pagar kantor dan memberi informasi bahwa Bupati tidak ada ditempat) dan Pemerintah tetap menjalankan aturan/UU yang berlaku

8. Siapa saja mitra/koalisi dari pihak nelayan dalam memenangkan aspirasinya?

Jawaban: Beberapa masyarakat nelayan yang turun melakukan demo di depan kantor bupati (**responden pun ikut turun melakukan aksi demo**) bersama dengan beberapa mahasiswa dari pulau kayuadi

9. Mengapa melibatkan pihak lain dalam memenangkan aspirasinya?

Jawaban : Agar aspirasinya mudah didengar dan diberikan solusi oleh pemerintah

10. Siapa saja pihak yang membantu dari masyarakat/nelayan dalam proses resolusi konflik?

Jawaban : Tidak ada

11. Dalam kapasitas apa pihak yang membantu proses resolusi konflik tersebut?

Jawaban : –

12. Kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah/Balai TN Taka Bonerate dalam penanganan konflik?

Jawaban : Ketika mendapati nelayan menggunakan compressor, jagawana menjalankan tugasnya. Jagawana ramah kepada kami, dan meminta kami menginginkan Kembali compressor kami, maka diurusnya di benteng. Sejauh ini,

selama compressor kami diambil oleh jagawana, belum ada yg pernah Kembali ke kami. Kadi kami beli Kembali compressor baru dengan cara **mengutang di pemodal**. Ketika jagawana menangkap kami, kami diberi arahan terkait aturan dalam Kawasan dan kami membuat surat pernyataan tidak menggunakan kompresor Kembali.

13. Apa harapan/saran anda terkait dengan penanganan konflik? Harus memahami bahwa kami mencari hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga

Lampiran 10 : Hasil wawancara 3, komunitas Bonelambere

Nama : Nuardi

Umur : 50 tahun

Pekerjaan : Nelayan

Peranan : ABK

1. Bagaimana pandangan anda tentang kawasan Taman Nasional Taka Bonerate bagi masyarakat nelayan?

Jawaban : Kawasan adalah Tempat menyelam mencari ikan yang banyak

2. Mengapa menggunakan alat bantu compressor dalam penangkapan ikan?

Jawaban : Banyak hasilnya dibanding menggunakan alat lain. bUbu dan pukot kurang mendapat ikan walaupun dalam Kawasan.

3. Apakah nelayan/masyarakat menyadari bahwa mereka berada dalam konflik?

Jawaban : Iya, jagawana adalah lawan kita Ketika masuk di Kawasan. Mereka ambil compressor kami

4. Apakah masyarakat memahami dinamika konflik yang melibatkan mereka?

Jawaban : Sangat memahami tetapi kami tidak bisa mencari uang untuk menghidupi keluarga dengan menggunakan alat tangkap lain

5. Apa saja tuntutan nelayan/masyarakat terhadap Balai TN Taka Bonerate/Pemerintah?

Jawaban : Compressor bisa dijadikan alat bantu yang legal/bebas Ketika digunakan dalam mencari ikan. Pengguna pukot untuk memukat hiu, mereka jg menggunakan compressor untuk melepaskan pukot yang tersangkut di batu.

6. Bagaimana tanggapan masyarakat setelah mengetahui sikap dan/atau tindakan dari pemerintah?

Jawaban : Masyarakat pernah melakukan demo berharap agar pemerintah mendengarkan keinginan mereka untuk melegalkan penggunaan compressor. Dilakukan di depan kantor bupati

7. Apa saja penyebab kegagalan nelayan untuk mengkalaim tuntutannya?

Jawaban : Tidak bisa dihilangkan karena Pemerintah tetap menjalankan aturan/UU yang berlaku

8. Siapa saja mitra/koalisi dari pihak nelayan dalam memenangkan aspirasinya?

Jawaban : Beberapa masyarakat nelayan yang turun melakukan demo di depan kantor bupati bersama dengan beberapa mahasiswa dari pulau kayuadi.

9. Mengapa melibatkan pihak lain dalam memenangkan aspirasinya?

Jawaban : Agar aspirasinya mudah didengar dan diberikan solusi oleh pemerintah

10. Siapa saja pihak yang membantu dari masyarakat/nelayan dalam proses resolusi konflik?

Jawaban : Tidak ada. pendemo mencari bupati, jadi demo dilakukan di kantor bupati. Demo bubar Ketika sudah sore dan dianggap tidak ada tanggapan dari pemerintah.

11. Dalam kapasitas apa pihak yang membantu proses resolusi konflik tersebut?

Jawaban : –

12. Kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah/Balai TN Taka Bonerate dalam penanganan konflik?

Jawaban : –

13. Apa harapan/saran anda terkait dengan penanganan konflik?

Jawaban : Tidak ada

Lampiran 11 : Hasil wawancara 4, komunitas Bonelambere

Nama : Amran

Umur : 30 tahun

Pekerjaan : Nelayan

Peranan : ABK

1. Bagaimana pandangan anda tentang kawasan Taman Nasional Taka Bonerate bagi masyarakat nelayan?

Jawaban : Ketika memikirkan Kawasan, yang kami ingat adalah takut kesana. Karena kami sudah beberapa kali ditangkap jagawana jadi kadang kami mencari di luar kawasan

2. Mengapa menggunakan alat bantu compressor dalam penangkapan ikan?

Jawaban : Cepat dapat ikan dan mudah digunakan

3. Apakah nelayan/masyarakat menyadari bahwa mereka berada dalam konflik?

Jawaban : Iya

4. Apakah masyarakat memahami dinamika konflik yang melibatkan mereka?

Jawaban : Sangat memahami dan banyak resiko yang akan dihadapi seperti penyitaan compressor tetapi kami hanya melakukan seolah berani tapi kami tidak tenang Ketika mencari dalam kawasan

5. Apa saja tuntutan nelayan/masyarakat terhadap Balai TN Taka Bonerate/Pemerintah?

Jawaban : Mereka masa bodoh dengan aturan yang ada dan tetap mencari ikan menggunakan kompresor. Berharap Compressor bisa dijadikan alat bantu yang legal/bebas Ketika digunakan

6. Bagaimana tanggapan masyarakat setelah mengetahui sikap dan/atau tindakan dari pemerintah?

Jawaban : Tidak melakukan apa-apa

7. Apa saja penyebab kegagalan nelayan untuk mengkalaim tuntutannya?

Jawaban : –

8. Siapa saja mitra/koalisi dari pihak nelayan dalam memenangkan aspirasinya?

Jawaban : –

9. Mengapa melibatkan pihak lain dalam memenangkan aspirasinya?

Jawaban : –

10. Siapa saja pihak yang membantu dari masyarakat/nelayan dalam proses resolusi konflik?

Jawaban : –

11. Dalam kapasitas apa pihak yang membantu proses resolusi konflik tersebut?

Jawaban : –

12. Kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah/Balai TN Taka Bonerate dalam penanganan konflik?

Jawaban : Ketika melakukan penangkapan ikan menggunakan compressor, jagawana menangkap pernah menangkap kami, memanggil ke pos, dan disuruh bersumpah agar tidak menggunakan compressor dalam kawasan

13. Apa harapan/saran anda terkait dengan penanganan konflik?

Jawaban : Berharap bisa membiarkan kami mencari ikan dalam Kawasan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Jagawana sudah menjalankannya dengan baik. Ketika kami ditangkap, mereka sangat sopan dalam memperlakukan kami.

Lampiran 12 : Hasil wawancara 5, komunitas Bonelambere

Nama : Sudarmin

Umur : 39 tahun

Pekerjaan : Nelayan

Peranan : Juragan/Kapten Kapal

1. Bagaimana pandangan anda tentang kawasan Taman Nasional Taka Bonerate bagi masyarakat nelayan?
Jaawaban : Ketika membahas Kawasan, yang kami ingat adalah rasa takut. Karena kami sudah beberapa kali ditangkap jagawana Ketika melakukan penangkapan ikan menggunakan compressor.
2. Mengapa menggunakan alat bantu compressor dalam penangkapan ikan?
Jawaban : Cepat dapat ikan dan mudah dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Hasilnya beda dengan alat tangkap lain. Hasilnya cepat dan mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.
3. Apakah nelayan/masyarakat menyadari bahwa mereka berada dalam konflik?
Jawaban : Iya
4. Apakah masyarakat memahami dinamika konflik yang melibatkan mereka?
Jawaban : Sangat memahami. kami pernah mendengar berita untuk masuk ke benteng mengambil sendiri compressor kami yang telah disita tetapi sesampainya di Benteng, kami tidak mendapatkan compressor tersebut.
5. Apa saja tuntutan nelayan/masyarakat terhadap Balai TN Taka Bonerate/Pemerintah?
Jawaban :Berharap Compressor bisa dijadikan alat bantu yang legal/bebas Ketika digunakan dalam kawasan
6. Bagaimana tanggapan masyarakat setelah mengetahui sikap dan/atau tindakan dari pemerintah?
Jawaban : -
7. Apa saja penyebab kegagalan nelayan untuk mengkalaimuntutannya?
Jawaban : Tidak melakukan apa-apa. Ketika kami ditangkap, kami berikan compressor kami tanpa melakukan perlawanan
8. Siapa saja mitra/koalisi dari pihak nelayan dalam memenangkan aspirasinya?
Jawaban : -
9. Mengapa melibatkan pihak lain dalam memenangkan aspirasinya?
Jawaban : -
10. Siapa saja pihak yang membantu dari masyarakat/nelayan dalam proses resolusi konflik?
Jawaban : -
11. Dalam kapasitas apa pihak yang membantu proses resolusi konflik tersebut?
Jawaban : -
12. Kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah/Balai TN Taka Bonerate dalam penanganan konflik?
Jawaban : Mereka mengambil compressor kami.
13. Apa harapan/saran anda terkait dengan penanganan konflik?
Jawaban : Seandainya kami bisa bebas menggunakan compressor dalam kawasan

Lampiran 13 : Hasil wawancara 6, komunitas Jinato

Nama : H Muhammad Neng

Umur : 25 Juli 1977, 46 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Peranan : Pemodal

1. Bagaimana pandangan anda tentang kawasan Taman Nasional Taka Bonerate bagi masyarakat nelayan?

Jawaban : Saya dulu sebagai pembeli ikan, setelah sy dilapor-lapor, adami juga anggota yang korban, sering juga dipanggil sama petugas, sehingga saya juga mau hidup tenang toh, makanya saya berhenti. Jadi lebih baik saya berhenti, skrg sy jadi pembuat kapal-kapal piber untuk nelayan.

2. Mengapa menggunakan alat bantu kompresor dalam penangkapan ikan?

Jawaban : Bedanya itu compressor cepat ki dapat ikan. Kalau pemancing cepat juga tapi tidak banyak ikan. Makanya skrg sy kasih banyak pemancing, ada sekitar 50 kapal. Saya juga sudah kasih tau penjaga karamba agar tidak ambil ikan bom dan compressor. Ada juga laporan bahwa nelayanku mengusir nelayan compressor

3. Tahun berapa berkonflik dan Apa saja tuntutan nelayan/masyarakat terhadap Balai TN Taka Bonerate/Pemerintah saat berkonflik?

Jawaban : Mulai kompresor tahun 1997 s/d 2018. 2017 sy diambil, selama itu saya tidak tenang. 2018 saya sudah tidak menerima mi. Beranikan beli bagang, beranikan beli kapal, saya kasih pakai kapal ke masyarakat sekitar 700 juta. Hasilnya saya yang beli. Tidak kasih utangmi.

4. Apakah nelayan/masyarakat menyadari bahwa mereka berada dalam konflik?

Jawaban : Fungsi kawasan, sampai sekarang baik baik semua hasilnya, mulai bagus. Itu ji kalau ada masuk panah compressor, kami tidak dapat. Kurang ki ikan.

5. Apakah masyarakat memahami dinamika konflik yang melibatkan mereka?

Jawaban : Nelayan tau kalau berkonflik karena itu anu dilarang.

6. Bagaimana tanggapan masyarakat setelah mengetahui sikap dan/atau tindakan dari pemerintah?

Jawaban : Tanggapan nelayan, nelayan minta pertahankan tapi saya tidak maumi lagi dikata-katai sama petugas. Kita ini sudah berumur jadi kita harus berubah. Adami juga korban, adami yang jadi janda, janda compressor itu anggota. Itu semua saya sadari jadi saya mau berhenti mi.

7. Apa saja penyebab kegagalan nelayan untuk mengklaim tuntutannya?

Jawaban : Tidak dijawab

8. Siapa saja mitra/koalisi dari pihak nelayan dalam memenangkan aspirasinya?

Jawaban : Aspirasi, tidak pernah. Langsung ji ke saya aspirasinya.

9. Mengapa melibatkan pihak lain dalam memenangkan aspirasinya?

Tidak ada

10. Siapa saja pihak yang membantu dari masyarakat/nelayan dalam proses resolusi konflik?

Tidak dijawab

11. Dalam kapasitas apa pihak yang membantu proses resolusi konflik tersebut?

Tidak dijawab

12. Mengapa anda beralih dari kegiatan illegal ke kegiatan legal?

Jawaban :

Awalnya saya beli belut/ular, kerja Pang Es. Kemudian ketemu bos di Makassar, dari situ saya mulai usaha. Dulu saya ditemui Pak Tarigan(Kapolres saat itu) agar disuruh berhenti, dinasehati.

13. Kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah/Balai TN Taka Bonerate saat akan beralih ke kegiatan legal sampai sekarang?

Jawaban :

Alhamdulillah bagus caranya merespon cuman itu ji kalau masih ada panah compressor.

Saya mulai tidak boleh ada lagi utang-utang.

14. Apa harapan/saran anda ke pihak Balai TN Taka Bonerate?

Jawaban :

1. Harusnya itu Bosnya di datangi(Bos Besar). Harus ditangkap, kalau ada bosnya berhenti ada lagi bosnya lagi yang lain. Jadi harus didatangi bosnya yang lebih besar. Saya dulu ada Bos di Makassar, ada lagi di Jakarta, Bos ku China. Tidak ada putusnya.
2. Saya minta panah kompressor dari kayuadi dihentikan itu karena msasyarakat disini di jinato sudah tidak adami. Itu sebaiknya didatangi Bosnya compressor.
3. **Satu-satunya cara adalah temui Bosnya agar dihentikan.**

Lampiran 14 : Hasil wawancara 7, pihak pengelola
 Nama : Faat Rudianto, S. Hut, M. Si
 Umur : 50 Tahun
 Pekerjaan : ASN
 Jabatan : Kepala Balai TN Taka Bonerate tahun 2018 s/d 2022

1. Bagaimana pandangan anda tentang kawasan TN Taka Bonerate bagi masyarakat nelayan?
 Taman Nasional Taka Bonerate harus memberikan manfaat kepada masyarakat, baik itu masyarakat didalam kawasan maupun dari luar kawasan.
2. Apa saja jenis-jenis konflik pengelolaan di TN Taka Bonerate antara pihak Balai dengan nelayan pada tahun 2017-2022?
 Sebenarnya dengan nelayan bukan konflik tapi nelayan melakukan mencari ikan dengan destruktif, mencari ikan dengan alat yang tidak ramah lingkungan
3. Mengapa penggunaan alat bantu kompressor dilarang didalam kawasan TN Taka Bonerate?
 Berdasarkan undang undang perikanan no 45 tahun 2004 yang melarang compressor itu dilarang digunakan sebagai alat penangkapan ikan. Jadi bukan TN Taka Bonerate yang melarang penggunaan Kompressor.
4. Apa manfaat kawasan TN Taka Bonerate secara ekonomi politik global?
 Pengelolaan TN Taka Bonerate tidak hanya bermanfaat dari wisata saja tapi bagaimana TN Taka Bonerate menjaga ketahanan pangan dari sector perikanan. Kita bisa bayangkan kalau kawasan ini tidak dijaga karena yang dari luar saja misalnya dari Pangkep mencari ke kawasan kita.
5. Adakah instrument/alat global saat ini yang mendorong mediasi konflik?
 Di KLHK punya program khususnya di KSDAE punya program kemitraan konservasi, jadi kita memberikan peluang kepada kelompok nelayan untuk bermitra dengan TN Taka Bonerate dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di TN Taka Bonerate.
6. Bagaimana sistem pemerintahan melakukan penanganan destruktive fishing khususnya Kompressor. Apakah demokratis atau otoriter, Jelaskan?
 Penanganan compressor sudah tidak bisa didiskusikan lagi harus dengan low enforcemen, seharusnya nelayan yang menggunakan compressor sudah tidak bisa lagi didiskusikan karena sebenarnya nelayan yang menggunakan compressor harus dipidanakan. Sudah ada dalam peraturan perikanan, ada ancaman pidananya selama 5 tahun keatas.
7. Apakah ada bentuk pranata social(norma-norma) di Taka Bonerate dalam penangkapan hasil laut?
 Pranata sosial tidak ada tapi yang diwariskan adalah bagaimana menangkap ikan dengan bom dan bus. Itu adalah warisan yang salah dan untuk itu perlu dilakukan pendekatan pendekatan ke masyarakat agar tidak mau mengubah cara-cara destruktif tersebut.
8. Bagaimana bentuk tradisi sosial di TN Taka Bonerate dalam penangkapan hasil laut?
 Tidak bentuk tradisinya tapi ada warisan menangkap ikan dengan bom dan bus. Itu merupakan warisan social yang salah.

9. Apakah menggunakan kompressor dan bom sudah menjadi tradisi di TN Taka Bonerate?
Bukan tradisi
10. Bagaimana sejarah penggunaan kompressor dan bom di TN Taka Bonerate?
Penggunaan compressor sudah lama bahkan disinyalir sejak sebelum adanya TN, mengapa kompresor karena Karena compressor adalah alat vital yang dilakukan dalam Destruktif fishing. Tanpa kompresor mereka akan sangat kesulitan dalam mengambil hasilnya.
11. Bagaimana dinamika dan perubahan penggunaan kompressor dan bom di TN Taka Bonerate?
Dinamikanya Turun, kalau kami menyimpulkan untuk penggunaan compressor sudah 95%, untuk DF sekitar 90% karena teman teman di Balai TN Taka Bonerate konsisten dalam penanganan kompresor.
12. Apa penyebab munculnya konflik tentang penggunaan kompressor?
terjadi konflik karena nelayan juga punya Baking/oknum, mereka ini yang memberikan stimulus agar tetap melakukan aktifitasnya. Bahkan ada yang sampai 3-4 kali ditangkap.
13. Bagaimana cara masing-masing konflik diselesaikan melalui mekanisme birokrasi yang berjalan saat itu?
Dengan penegakan hukum, kompresor disita. Proses hukumnya tidak dilanjutkan kalau mereka ngotot maka akan dilanjutkan proses hukumnya.
14. Kebijakan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan konflik kompressor/bom?
Banyak cara dalam penanganan DF, kami melakukan penyadartahuan, sosialisasi, pendekatan social dengan mengubah pola perilaku mereka. Bagaimana memberikan alternative pencaharaian, ada yang menjadi beralih jadi guide, mengubah kapalnya jadi kapal wisata. Kami juga ubah ikan targetnya, kami harus pastikan dengan penangkapan ramah lingkungan.
15. Apakah kebijakan itu bertentangan dengan pihak nelayan?
Kebijakan itu tidak ada yang bertentangan dengan nelayan. Yang terjadi nelayan yang menggunakan bom dan bius yang diubah, nah yang tidak berubah itu itulah 10%. Kami punya program live in atau tinggal di rumah nelayan yang diduga pelaku DF. Agar petugas mengetahui apa masalahnya, apa yang bisa dibantu buat mereka, apa yang belum mereka pahami.
16. Apa saja regulasi/aturan yang terkait dengan konflik tersebut?
Regulasi : UU Perikanan tentang larangan alat bantu salah satunya kompressor, UU no 99 tentang KSDAE, itulah Undang undang yang bertentangan dengan nilai nilai konservasi. Jadi **konservasi bukan melarang tapi mengatur**. Bagaimana mengatur manusia memanfaatkan sumber daya tersebut secara berkesinambungan.
17. Apakah ada instansi pemerintah yang terlibat dalam konflik?
Ada yang oknum yang bertindak sebagai beking namun ada juga banyak instansi yang membantu
18. Siapa saja mitra Balai TN Taka Bonerate dalam penanganan konflik?
Mitra banyak baik internasional dan nasional. Mitra TN WWF, WCS, RARE. Kelompok local mattiro tasi.
19. Bagaimana metode yang digunakan oleh Balai TN Taka Bonerate beserta mitra dalam menangani dan/atau menahan konflik agar tidak meluas dan menjadi perhatian kritis masyarakat luas?

Penyadartahuan, sosialisasi, pendekatan social dengan mengubah pola perilaku mereka

20. Bagaimana strategi yang digunakan oleh Balai TN Taka Bonerate beserta mitra dalam menangani dan/atau menahan konflik agar tidak meluas dan menjadi perhatian kritis masyarakat luas?

Strateginya Preemitive, preventive dan law enforecemen(penegakan hukum) kemudian kemitraan konservasi. Ada role model pengelolaan ekowisata, ada role model pengelolaan perikanan, ada banyak cara. Nah sekarang sudah dinikmati diaman whaleshark sudah masuk ke TN, itu membuktikan TN Terjaga.

21. Apa saja kepentingan utama pemerintah/Balai TN Taka Bonerate terkait dengan konflik?

Ada madat yang diberikan, itu yang harus dijaga. Misalnya perlindungan terumbu karang. Triton penyu sisik, perlindungan ke masyarakat.

22. Siapa saja pihak-pihak yang mendukung pemerintah dalam penanganan konflik?

Ada banyak, kosnervasi itu tidak bisa sendiri-sendiri harus bersama-sama.

23. Bagaimana mekanisme kerjasamanya?

PKS kemudian ditindak lanjuti dengan RPP dan RKT. Mitra bekerjasama dengan Balai harus sesuai dengan RPP dan RKT.

24. Apakah ada keterlibatan pihak ketiga didalam konflik?

Keterlibatan pihak ketiga ada karena kepentingan ekonomi. Itu kayak rantai makanan, ada penyuplai, ada yang menjaga agar rantai pasar itu tetap terjaga. Sehingga ada siklus materi, ada banyak oknum dilaut, lebih banyak dilaut daripada di darat.

28. Siapa mediator didalam konflik?

Tidak melalui mediator, mengalir saja bagaimana pihak TN dalam penanganan aktifitas DF.

29. Apa kepentingannya dalam menjadi mediator? -

30. Apakah mediator menjadikan laten atau manifest? -

31. Kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh pengelola dalam pencegahan konflik?

Sosialisasi, kampanye, festival. Banyak yang sudah dilakukan.

32. Kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh pengelola dalam penanganan konflik?

Penyadartahuan, sosialisasi, pendekatan social dengan mengubah pola perilaku mereka

33. Kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh pengelola dalam pemulihan pasca konflik?

Tidak dijawab

34. Apakah kegiatan penanganan konflik telah tepat sasaran terhadap yang berkonflik?

Sangat tepat. Dapat dilihat dari sisa pelaku yang sisa 10%.

35. Apakah kegiatan penanganan konflik dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat?

Dirasakan manfaatnya, sekarang nelayan sudah tidak jauh mencari ikan. Sehingga hemat waktu dan Bahan Bakar Minyak.

36. Apakah kegiatan penanganan konfliknya berhasil meredam konflik? Berhasil

37. Jika berhasil, mengapa? sekarang nelayan sudah tidak jauh mencari ikan. Sehingga hemat waktu dan Bahan Bakar Minyak.
38. Jika tidak berhasil mengapa? -
39. Apa kendala dalam penanganan konflik yang telah dilakukan?
Kendala penangan konflik. **Oknum, itu tantangan yang paling besar adalah bagaimana menyadarkan oknumnya. Supaya mereka tidak memelihara kegiatan destruktif fishing. Nelayan itu mau sadar, mau berubah tapi ada yang menyuruh mereka.**

Lampiran 15 : Hasil wawancara 8, pihak pengelola
 Nama : Raduan, S. H
 Umur : 52 Tahun
 Pekerjaan : ASN
 Jabatan : Kepala SPTN Wilayah I Tarupa

1. Bagaimana pandangan anda tentang kawasan TN Taka Bonerate bagi masyarakat nelayan?
 TN Taka Bonerate sangat penting untuk masyarakat sekitar karena sebagai kawasan konservasi sumber daya alam yang tujuannya agar masyarakat dapat melakukan penangkapan ikan secara berkelanjutan.
2. Apa saja jenis-jenis konflik pengelolaan di TN Taka Bonerate antara pihak Balai dengan nelayan pada tahun 2017-2022?
 Sebenarnya berbicara konflik tapi masyarakat pengguna kompresor merasa dibatasi penggunaannya. Konfliknya lebih ke masyarakat yang beraktifitas sebagai destructive yang lebih diawasi.
3. Mengapa penggunaan alat bantu kompresor dilarang didalam kawasan TN Taka Bonerate?
 Penggunaan alat bantu kompresor pada tahun 1999 digunakan untuk menangkap teripang masih bisa tapi sekarang sudah tidak bisa karena tidak ramah lingkungan dengan penangkapan yang berlebihan. Berbeda dengan pancing, penangkapan yang berlebihan dan berbahaya bagi kesehatan makanya compressor itu dilarang oleh undang-undang.
4. Apa manfaat kawasan TN Taka Bonerate secara ekonomi politik global?
 Secara ekonomi kawasan ini kaya tentang keanekaragaman hayati dan secara global TN Taka Bonerate tidak boleh punah. Secara politik pemerintah perlu dipertahankan agar atoll di Kab Selayar ini tetap bertahan dengan baik.
5. Adakah instrument/alat global saat ini yang mendorong mediasi konflik?
 Undang undag no 5 pasal 33, setiap orang dilarang merusak kawasan konservasi. Beberapa kegiatan telah dilakukan dengan penyuluhan dan sosialisasi.
6. Bagaimana sistem pemerintahan melakukan penanganan detruktive fishing khususnya Kompresor. Apakah demokratis atau otoriter, Jelaskan?
 Pemerintah memiliki kewenangan melarang kegiatan yang merusak kawasan konservasi, kami sering melakukan pembinaan kepada beberapa masyarakat agar masyarakat tersebut memahami tentang peraturan yang berlaku.
7. Apakah ada bentuk pranata social(norma-norma) di Taka Bonerate dalam penangkapan hasil laut?
 Sebenarnya berbicara penangkapan ikan dulu mereka punya cara penangkapan yang tidak berlebihan dan dengan waktu waktu tertentu namun mulai pudar.
8. Bagaimana bentuk tradisi sosial di TN Taka Bonerate dalam penangkapan hasil laut?
 Tradisi sosial yang saya liat di hari jumat tidak menangkap ikan.
9. Apakah menggunakan kompresor dan bom sudah menjadi tradisi di TN Taka Bonerate?
 Bukan tradisi, bom dan kompresor didalam kawasan malahan yang banyak menggunakan kompresor dari luar kawasan dari Desa Nyiur Indah.

10. Bagaimana sejarah penggunaan kompressor dan bom di TN Taka Bonerate?
Sejarah bom dulu pada tahun 1999 masih sedikit yang mengetahui penggunaan bom. Sekarang penggunaan Bom malah banyak dari local. Tahun 1999-2000 saat sy bertugas, penggunaan kompressorm untuk panah ikan tapi belum dilarang. Untuk kompressor malah marak sekarang tapi dari luar kawasan dan sudah dilarang oleh Undang-undang perikanan.
11. Bagaimana dinamika dan perubahan penggunaan kompressor dan bom di TN Taka Bonerate?
sejak 5 tahun terakhir, khususnya tarupa tempat saya bertugas ada sekitar 39 yang pelaku Destruktiv Fishing(BOM) ada penurunan. Kalau compressor kami belum data, data berupa informasi.
12. Apa penyebab munculnya konflik tentang penggunaan kompressor?
Tahun 2019 TN Taka Bonerate 2x di demo dari masyarakat Desa Nyiur Indah, kita TN intensif pengamanan pada tahun itu. Masyarakat Desa Nyiur Indah keberatan, mereka ingin agar tetap menggunakan bisa menggunakan alat bantu kompressor didalam kawasan konservasi. Masyarakat didalam kawasan sebagian besar menangkap ikan tanpa compressor dan banyak yang masyarakat yang melapor ke petugas TN tentang adanya aktifitas pengguna kompresor dari luar kawasan.
13. Bagaimana cara masing-masing konflik diselesaikan melalui mekanisme birokrasi yang berjalan saat itu?
Saat demo waktu itu saya sempat hadir, kami hadir dan mejelaskan dan dengar pendapat dengan muspida. Saat itu kami menyampaikn bahwa penggunaan kompresor dapat menimbulkan penangkapan ikan yang berlebih. Saat itu di DPRD dan Polres.
14. Kebijakan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan konflik kompressor/bom?
Piagam Pa'jukukang, piagam itu salah satu bentuk kebijakan atau komitmen pemerintah daerah.
15. Apakah kebijakan itu bertentangan dengan pihak nelayan?
Kalau dengan nelayan destruktive yang pasti merasa bertentangan karena merasa dihalang halangi aktifitasnya. Tapi kita TN dan Pemda hanya melaksanakan amanat undang undang yang harus juga ditegakkan.
16. Apa saja regulasi/aturan yang terkait dengan konflik tersebut?
UU no 5 tentang KSDAE yang mengatur pengelolaan TN secara umum yang mengatur kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan. Ada juga regulasi lain seperti UU Perikanan dan UU Lingkungan Hidup.
17. Apakah ada instansi pemerintah yang terlibat dalam konflik?
Secara langsung belum ada saya dengar ada instansi yang terlibat
18. Siapa saja mitra Balai TN Taka Bonerate dalam penanganan konflik?
Kepolisian, TNI, Pemda, Bimas, Binsa, NGO, Masyarakat Mitra Polhut, komunitas lingkungan yang punya visi yang sama dalam penaganan lingkungan.
19. Bagaimana metode yang digunakan oleh Balai TN Taka Bonerate beserta mitra dalam menangani dan/atau menahan konflik agar tidak meluas dan menjadi perhatian kritis masyarakat luas?
Melakukan penyuluhan terpadu, melakukan patrol terpadu dan bila ada ditemukan akan dilakukan pembinaan dan langkah terakhir kami lakukan refresif. Kami lebih banyak pencegahan.

20. Bagaimana strategi yang digunakan oleh Balai TN Taka Bonerate beserta mitra dalam menangani dan/atau menahan konflik agar tidak meluas dan menjadi perhatian kritis masyarakat luas?
Focus terhadap ada penggunaan compressor saja. Strategi bila sering dilakukan patrol maka akan terjadi pencegahan. Patroli adalah cara yang ampuh untuk dilakuakn pencegahan.
21. Apa saja kepentingan utama pemerintah/Balai TN Taka Bonerate terkait dengan konflik?
Ingin kawasan TN menjadi terlindung dan terjaga, bertambah kalau bisa. Sehingga masyarakat mendapatkan penangkapan ikan yang melimpah dan berlanjut.
22. Siapa saja pihak-pihak yang mendukung pemerintah dalam penanganan konflik?
TNI Polri termasuk masyarakat didalam kawasan, sebagian besar masyarakat ingin kawasannya terjaga dan terlindungi.
23. Bagaimana mekanisme kerjasamanya?
Dengan mitra dengan koordinasi terkait kegiatan bersama. Dengan NGO dengan MOU
24. Apakah ada keterlibatan pihak ketiga didalam konflik?
Terkadang nelayan saat ditemukan tidak mau menyebutkan Oknum, yang selama ini yang saya temukan tidak ada.
25. Siapa Yang menunggangi dan untuk apa?
-
26. Siapa saja para aktor di pihak nelayan?
Aktornya adalah pemodal yang jadi pebisnis yang menampung hasil dari destruktive.
27. Siapa saja mitra/koalisi di pihak nelayan?
Ada aliansi masyarakat peduli nelayan sebagai pendamping masyarakat. Mungkin ada keluarganya yang punya kompresor.
28. Siapa mediator didalam konflik?
Saat itu Kepala Kejaksaan dan Polres. Pak Kajari yang menyampaikan bahwa penggunaan Kompresor itu dilarang. Saya menyampaikan bahwa Balai TN Taka Bonerate melarang compressor dalam upaya menjaga kawasan konservasi agar tidak rusak yang ujung ujungnya untuk masyarakat juga. Lokasinya di DPRD.
29. Apa kepentingannya dalam menjadi mediator?
DPRD menyerap aspirasi masyarakat.
30. Apakah mediator menjadikan laten atau manifest?
Mediasi menjadikan konflik menjadi lebih kondusif/laten. Disampaikan bahwa ini amanat UU jadi kalau keberatan ada mekanismenya.
31. Kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh pengelola dalam pencegahan konflik?
Pre emtif Penyuluhan ke masyarakat sebagai uaya terjadinya kegiatan DF. Alat apa saja yang ramah lingkungan, penyuluhan ke rumah rumah.
32. Kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh pengelola dalam penanganan konflik?
Diskusi-diskusi dengan masyrakat desa untuk penagnan konfliknya.
33. Kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh pengelola dalam pemulihan pasca konflik?

yang diamankan diberikan pemahaman, dulu ada 11 yang diamankan. Terus dilakukan pemahaman sosialisasi tetap dilakukan.

34. Apakah kegiatan penanganan konflik telah tepat sasaran terhadap yang berkonflik?

Tepat ke pengguna kompresor dan mencegah yang belum.

35. Apakah kegiatan penanganan konflik dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat?

Masyarakat sangat senang terutama pemancing, masyarakat menjadi senang karena banyak mendapatkan hasil pancing. Masyarakat yang didalam kawasan yang menggunakan alat tradisional yang wilayah/lokasinya tidak terganggu.

36. Apakah kegiatan penanganan konfliknya berhasil meredam konflik?

Ya berhasil

37. Jika berhasil, mengapa?

Dengan destruktive yang berkurang maka nelayan tradisional banyak mendapatkan hasil laut.

38. Jika tidak berhasil mengapa?

-

39. Apa kendala dalam penanganan konflik yang telah dilakukan?

Kurangnya personil, dengan banyak personil maka akan terjadi pencegahan. Wilayah yang luas. Kurang personil untuk dilakukan patroli. Untuk dilaut yang efektif adalah patrol. Berbeda dengan di daratan, yang efektif adalah penjagaan.

Lampiran 16 : Hasil wawancara 9, pihak pengelola
 Nama : Fahmi Sayamsuri, S. H
 Umur : 48 Tahun
 Pekerjaan : ASN/Polhut
 Jabatan : Koordinator Polhut TN Taka Bonerate

1. Bagaimana pandangan anda tentang kawasan TN Taka Bonerate bagi masyarakat nelayan?
 Dengan adanya TN Taka Bonerate perairan mereka terjaga. Andaikan tidak ada TN maka habismi hasil lautnya karena banyak juga dari nelayan dari luar.
2. Apa saja jenis-jenis konflik pengelolaan di TN Taka Bonerate antara pihak Balai dengan nelayan pada tahun 2017-2022?
 Yang dominan itu banyak dari nelayan dari luar pengguna compressor. Penggunaan alat yang tidak ramah lingkungan.
3. Mengapa penggunaan alat bantu kompressor dilarang didalam kawasan TN Taka Bonerate?
 Penggunaan alat Kompressor bisa merusak kesehatan.
4. Apa manfaat kawasan TN Taka Bonerate secara ekonomi politik global?
 TN berfungsi sebagai pemanfaatan, perlindungan dan pelestarian sumber daya alam.
5. Adakah instrument/alat global saat ini yang mendorong mediasi konflik?
 Untuk saat ini ada termasuk adanya intervensi dari luar. Yang pernah Booming itu tentang penggunaan kompresor dengan pihak TN. Saat itu ada dukungan dari Bupati agar diusut sampai tuntas.
6. Bagaimana sistem pemerintahan melakukan penanganan destruktive fishing khususnya Kompressor. Apakah demokratis atau otoriter, Jelaskan?
 Masih demokratis karena penanganannya masih melihat sisi kemanusiaan.
7. Apakah ada bentuk pranata social(norma-norma) di Taka Bonerate dalam penangkapan hasil laut?
 Belum ada, saat ini akan diterapkan tentang mata ukuran jaring.
8. Bagaimana bentuk tradisi sosial di TN Taka Bonerate dalam penangkapan hasil laut?
 Ada sebenarnya Bugis sama Bajo, saat pesta ada jenis-jenis ikan yang dia butuhkan saat pesta. Cuman lambat laun sudah berkurang.
9. Apakah menggunakan kompressor dan bom sudah menjadi tradisi di TN Taka Bonerate?
 Bom dan compressor jadi tradisi : menurut saya iya, sudah jadi tradisi. Contohnya Bom tidak dapat ikan di tempat dalam.
10. Bagaimana sejarah penggunaan kompressor dan bom di TN Taka Bonerate?
 Setahu saya Bom yang memperkenalkan dari Buton.
11. Bagaimana dinamika dan perubahan penggunaan kompressor dan bom di TN Taka Bonerate?
 Naik turun sebenarnya, disaat pengawasan ketat. Berkurang ki, saat kurang pengawasan marak lagi. Contohnya saat Kapolres Pak Hidayat, pengawasan ketat nelayan kompressor ke perairan Pangkep dan Makassar beraktifitas.
12. Apa penyebab munculnya konflik tentang penggunaan kompressor?
 Kalau saya lihatnya pasca masyarakat Jinato berhenti total menggunakan kompressor, disitu masyarakat nelayan Jinato mengeluh sedangkan dari

nelayan dari luar banyak yang menggunakan kompressor. Dan itu sewaktu-waktu menjadi Bom waktu buat kita Pihak TN Taka Bonerate.

13. Bagaimana cara masing-masing konflik diselesaikan melalui mekanisme birokrasi yang berjalan saat itu?
Dilakukan hearing(difasilitasi) oleh DPRD karena sebagian anggota legislative yang merasa mengapa kompressor dilarang. Forkpimda semua hadir di saat hearing di DPRD. Bupati membackup karena mengetahui bahwa compressor itu dilarang.
14. Kebijakan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan konflik kompressor/bom?
Sosialisasi. Komunikasi lewat Camat, Kapolseknya dan Kepala Desanya bahwa Kompressor itu dilarang. Ada juga sudah dibuat piagam Pa'jukukang dan piagam latondu.
15. Apakah kebijakan itu bertentangan dengan pihak nelayan?
Pasti ada pro dan kontra, yang kontra itu yang pengguna compressor. Yang Pro adalah masyarakat yang mengetahui bahwa itu dilarang dan mengetahui efek penggunaannya. Masyarakat yang mengetahui juga manfaat dari pengelolaan TN Taka bonerate.
16. Apa saja regulasi/aturan yang terkait dengan konflik tersebut?
Sempat ada P21 tapi 5 Bulan ji vonisnya dengan menggunakan UU no 5 dan di jonctokan ke UU Perikanan.
17. Apakah ada instansi pemerintah yang terlibat dalam konflik?
Ada tapi bukan instansi, Oknum.
18. Siapa saja mitra Balai TN Taka Bonerate dalam penanganan konflik?
WWF, WCS. Pemerintah daerah dari Forkopimda
19. Bagaimana metode yang digunakan oleh Balai TN Taka Bonerate beserta mitra dalam menangani dan/atau menahan konflik agar tidak meluas dan menjadi perhatian kritis masyarakat luas?
kalau sama mitra yang ada aksinya adalah wcs, dia melibatkan masyarakat yang melakukan pengawasan. Saat nelayan memancing yang bertindak sebagai pengawas yang akan melaporkan ke pihak TN.
20. Bagaimana strategi yang digunakan oleh Balai TN Taka Bonerate beserta mitra dalam menangani dan/atau menahan konflik agar tidak meluas dan menjadi perhatian kritis masyarakat luas?
Pengawasan bersama msayarakat
21. Apa saja kepentingan utama pemerintah/Balai TN Taka Bonerate terkait dengan konflik?
Menjadikan TN lestari
22. Siapa saja pihak-pihak yang mendukung pemerintah dalam penanganan konflik?
Mitra dan forkopimda
23. Bagaimana mekanisme kerjasamanya?
Piagam-piagam, pelibatan personilnya
24. Apakah ada keterlibatan pihak ketiga didalam konflik?
Ada keterlibatan tapi Oknum
25. Siapa Yang menunggangi dan untuk apa?
Untuk Kepentingan pribadi
26. Siapa saja para aktor di pihak nelayan?
H Mangung dan Wahid. Yang banyak nelayannya H Mangung.

27. Siapa saja mitra/koalisi di pihak nelayan?
Itu hari ada yang mengaku manjadi Aliansi peduli nelayan. Mereka mahasiswa yang berasal dari anak nelayan.
28. Siapa mediator didalam konflik?
Pertama DPRD, terakhir Kapolres waktu itu. Jadi ceritanya demo ke DPRD, setelah dia demo lagi dia pawai singgah di kantor. Besoknya Pak Subarkah fasilitasi pihak TN dengan demonstran.
29. Apa kepentingannya dalam menjadi mediator?
Kepentingannya dia ingin mempertemukan pihak TN dengan demonstrasi
30. Apakah mediator menjadikan laten atau manifest?
Laten karena setelah dipertemukan oleh Kapolres sudah tidak ada lagi demonstrasi.
31. Kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh pengelola dalam pencegahan konflik?
Sosialisasi, sudah ada MOU dengan instansi terkait tentang penanganan illegal fishing. Termasuk dengan kelompok masyarakat yang ada kemitraan konservasi, di PKS itu mereka sudah mengatur wilayah tangkapnya.
32. Kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh pengelola dalam penanganan konflik?
ke masyarakat dalam kawasan, dilakukan dialog bahwa telah dilakukan penanganan/telah ada penindakan.
33. Kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh pengelola dalam pemulihan pasca konflik?
Setelah hearing ada dikembalikan kompresornya dengan perjanjian bila ditemukan akan langsung disita lagi alatnya. Ada yang kedua itu diserahkan sekitar 32 kompresor ke Polres bahwa akan dimusnahkan tapi Polres(Oknum) serahkan ke nelayan.
34. Apakah kegiatan penanganan konflik telah tepat sasaran terhadap yang berkonflik?
Sebenarnya tidak tepat.
35. Apakah kegiatan penanganan konflik dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat?
Sebenarnya dirasakan masyarakat karena setelah penanganan compressor mereka sudah bisa memancing dengan tenang.
36. Apakah kegiatan penanganan konfliknya berhasil meredam konflik?
Masih semacam bom waktu kapan pengawasan tidak ketat maka akan muncul lagi.
37. Jika berhasil, mengapa?
Setelah penanganan compressor mereka sudah bisa memancing dengan tenang.
38. Jika tidak berhasil mengapa?
-
39. Apa kendala dalam penanganan konflik yang telah dilakukan?
Tidak adanya komitmen karena penegakan aturan. Kalau berganti pimpinannya lain lagi kebijakannya. Padahal sudah ada juga piagam yang di tandatangani oleh pimpinan sebelumnya.

Lampiran 17 : Hasil wawancara 10, pihak pengelola

Nama : Asep Pranajaya, S. Pi

Umur : 41 Tahun

Pekerjaan : ASN/Penyuluh Kehutanan

Jabatan : Koordinator Penyuluh TN Taka Bonerate

1. Bagaimana pandangan anda tentang kawasan TN Taka Bonerate bagi masyarakat nelayan?
Menurut saya ada 2 Versi. Satu masyarakat beranggapan TN itu membatasi aktifitas mereka dalam mengelola sumber daya perikanan. Kedua TN malah membantu menjaga kelestarian sumber daya perikanan di dalam kawasan, itu dapat dilihat karena banyaknya nelayan dari luar yang masuk kawasan mencari ikan karena masih banyaknya sumber daya ikan di TN Taka Bonerate.punya peran penting lah masyarakat dan itu masih belum begitu disadari.
2. Apa saja jenis-jenis konflik pengelolaan di TN Taka Bonerate antara pihak Balai dengan nelayan pada tahun 2017-2022?
Bukan konflik Balai tapi balai TN harus terlibat karena lebih ke konflik pemanfaatan sumber daya perikanan antara nelayan didalam kawasan yang menggunakan alat yang berbeda antara nelayan pemancing/tradisional dengan nelayan panah pengguna kompressor dari luar kawasan. Jadi pihak Balai hanya berada ditengah-tengahnya sebaga pengelola. Balai ikut menegakkan aturan yang ada.
3. Mengapa penggunaan alat bantu kompressor dilarang didalam kawasan TN Taka Bonerate?
Secara undang-undang perikanan memang dilarang oleh menggunakan kompresor ban karena berbahaya bagi kesehatan. Berbahaya bagi penggunaanya sendiri.
4. Apa manfaat kawasan TN Taka Bonerate secara ekonomi politik global?
Secara global TN Taka Bonerate masuk dalam coral triagle jadi manfaatnya besar sebagai lumbung ikannya. Cagar Biosfer juga TN Taka Bonerate masuk tapi lebih ke kelestariannya.
5. Adakah instrument/alat global saat ini yang mendorong mediasi konflik?
-
6. Bagaimana sistem pemerintahan melakukan penanganan detruktive fishing khususnya Kompressor. Apakah demokratis atau otoriter, Jelaskan?
Cukup demokratis saya liat karena saat menemukan adanya pelanggaran tetap diberikan pemahaman, peringatan dan pembinaan dulu. Dan dari zonasi 90% dapat diakses oleh masyarakat.
7. Apakah ada bentuk pranata sosial(norma-norma) di Taka Bonerate dalam penangkapan hasil laut?
Dulu ada, ada ditulisan panglima menteng tapi sekarang sudah tidak ada. Yang tersisa adalah tidak menangkap dihari-hari tertentu.
8. Bagaimana bentuk tradisi sosial di TN Taka Bonerate dalam penangkapan hasil laut?
Warisan yang buruk yang masih tersisa tapi pelan-pelan berkurang.
9. Apakah menggunakan kompressor dan bom sudah menjadi tradisi di TN Taka Bonerate?
Tidak tahu karena sudah ada sejak bertugas
10. Bagaimana sejarah penggunaan kompressor dan bom di TN Taka Bonerate?

Semenjak saya masih disini 13 tahun yang lalu sudah ada.

11. Bagaimana dinamika dan perubahan penggunaan kompressor dan bom di TN Taka Bonerate?
Kalau didalam kawasan berkurang. Yang banyak dari luar kawasan. Jinato, latondu dan pasitallu timur sudah tidak ada.
12. Apa penyebab munculnya konflik tentang penggunaan kompressor?
Konflik antar nelayan yang berbeda alat tangkap. Nelayan didalam kawasan pakai alat sederhana(panah dan pancing) sedangkan nelayan dari luar kawasan memakai alat bantu kompressor.
13. Bagaimana cara masing-masing konflik diselesaikan melalui mekanisme birokrasi yang berjalan saat itu?
Lewat dialog, sosialisasi baru dilakukan penyitaan/penegakan hukum.
14. Kebijakan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan konflik kompressor/bom?
Sosialisasi, didalam kawasan kelompok nelayan dibina dan dilakukan kemitraan konservasi
15. Apakah kebijakan itu bertentangan dengan pihak nelayan?
Tidak, Kebijakannya tidak bertentangan dengan pihak nelayan didalam kawasan.
16. Apa saja regulasi/aturan yang terkait dengan konflik tersebut?
UU Perikanan, UU KSDAE, aturan yang disusun oleh kemitraan konservasi. Diaturannya disebutkan tidak menggunakan bom, bus dan kompresor.
17. Apakah ada instansi pemerintah yang terlibat dalam konflik?
Ada Oknum
18. Siapa saja mitra Balai TN Taka Bonerate dalam penanganan konflik?
Kepolisian, WCS, Pemda(Dinas Perikanan), Pemdes.
19. Bagaimana metode yang digunakan oleh Balai TN Taka Bonerate beserta mitra dalam menangani dan/atau menahan konflik agar tidak meluas dan menjadi perhatian kritis masyarakat luas?
Ada MOU dengan pihak terkait, ada juga piagam pa'jukukung kesepakatan pimpinan daerah. Ada forumnya, forum illegal fishing.
20. Bagaimana strategi yang digunakan oleh Balai TN Taka Bonerate beserta mitra dalam menangani dan/atau menahan konflik agar tidak meluas dan menjadi perhatian kritis masyarakat luas?
Sosialisasi dan komitmen dari para pihak, memberikan bantuan kepada nelayan dan memberikan pendampingan.
21. Apa saja kepentingan utama pemerintah/Balai TN Taka Bonerate terkait dengan konflik?
Agar kawasan tetap aman dan sumber daya alamnya lestari.
22. Siapa saja pihak-pihak yang mendukung pemerintah dalam penanganan konflik?
Masyarakat didalam kawasan dan mitra Balai TN Taka Bonarete misalnya WCS.
23. Bagaimana mekanisme kerjasamanya?
Kalau masyarakat ikut patrol bersama dan meberikan informasi bila ada kejadiannya. Kalau mitra ada banyak termasuk dana dan program kegiatannya.
24. Apakah ada keterlibatan pihak ketiga didalam konflik?
Ada oknum dari instansi tertentu. Mereka tahu nelayan pelaku dan ditarik

- pungli, mereka kayak melindungi.
25. Siapa Yang menunggangi dan untuk apa?
-
 26. Siapa saja para aktor di pihak nelayan?
Dari pulau Kayuadi di Bonelambere. Desa Nyiur Indah
 27. Siapa saja mitra/koalisi di pihak nelayan?
Tidak Tahu
 28. Siapa mediator didalam konflik?
Dari DPRD yang mengundang pihak Balai untuk dilakukan pertemuan. Bupati juga jadi mediator.
 29. Apa kepentingannya dalam menjadi mediator?
Posisinya ada ditengah-tengah. Mempertemukan pihak Balai dengan nelayan kompressor.
 30. Apakah mediator menjadikan laten atau manifest?
Cenderung Laten, setelah diberikan pemahaman aturannya.
 31. Kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh pengelola dalam pencegahan konflik?
Sosialisasi, menjalin kemitraan konservasi dengan kelompok nelayan, fasilitasi bantuan, menjalin kerjasama dengan mitra terkait(forum pemda).
 32. Kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh pengelola dalam penanganan konflik?
Dialog dengan nelayan
 33. Kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh pengelola dalam pemulihan pasca konflik?
Yang penting sudah tersampaikan bahwa didalam kawasan tidak bisa kompresor maka akan dilakukan penegakan hukum.
 34. Apakah kegiatan penanganan konflik telah tepat sasaran terhadap yang berkonflik?
Tepat karena dialognya langsung ke nelayan kompresor.
 35. Apakah kegiatan penanganan konflik dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat?
iya untuk nelayan di dalam kawasan karena mereka yang tinggal disitu dan mereka yang menjaga.
 36. Apakah kegiatan penanganan konfliknya berhasil meredam konflik?
Berhasil atau tidaknya perlu dianalisa lagi.
 37. Jika berhasil, mengapa? -
 38. Jika tidak berhasil mengapa?-
 39. Apa kendala dalam penanganan konflik yang telah dilakukan?
Tingkat kekerabatan nelayan. Kebanyakan mereka takut dalam melaporkan/bertindak karena masih ada hubungan kekeluargaan.
Anggaran terbatas
SDM terbatas.
Oknum juga menjadi kendala, sangat karena pelaku merasa dilindungi.

Lampiran 18 : Hasil wawancara 11, pihak pengelola
 Nama : Hendra Marannu, S. Sos
 Umur : 39 Tahun
 Pekerjaan : ASN/Polisi Kehutanan
 Jabatan : Kepala Resor Tinabo

1. Bagaimana pandangan anda tentang kawasan TN Taka Bonerate bagi masyarakat nelayan?
 Sangat bermanfaat karena dengan adanya kawasan TN Taka Bonerate yang dijaga dengan dengan baik akan bermanfaat ke masyarakat.
2. Apa saja jenis-jenis konflik pengelolaan di TN Taka Bonerate antara pihak Balai dengan nelayan pada tahun 2017-2022?
 Konflik pengelolaan terkait penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, penentuan zonasi khususnya zona inti karena ada yang setuju da nada yang tidak setuju. Namun yang paling besar adalah penggunaan alat tangkap dan alat bantu yang tidak ramah lingkungan.
3. Mengapa penggunaan alat bantu kompressor dilarang didalam kawasan TN Taka Bonerate?
 Bukan sebenarnya hanya didalam kawasan tapi seluruh Indonesia dimana UU perikanan yang berlaku di seluruh Indonesia yang melarang tentang penggunaan alat bantu yang tidak ramah lingkungan berupa kompressor.
4. Apa manfaat kawasan TN Taka Bonerate secara ekonomi politik global?
 Manfaat kawasan secara politik ekonomi global. Selain sebagai daerah penyangga juga sebagai destinasi wisata dari local dan mancanegara yang berkunjung ke kawasan TN Taka Bonerate.
5. Adakah instrument/alat global saat ini yang mendorong mediasi konflik?
 Untuk saat ini masih tingkat kabupaten salah satunya dengan dibentuknya piagam Pa'jukukang. Itu sebagai tindak lanjut mediasi penanganan konflik di kawasan TN Taka Bonerate.
6. Bagaimana sistem pemerintahan melakukan penanganan destruktive fishing khususnya Kompressor. Apakah demokratis atau otoriter, Jelaskan?
 Semenjak tahun 2009 sudah diberlakukan namun tidak langsung diterapkan da nada sosialisasi yang sudah dilakukan. Namun sebagian kecil sudah ada berubah tapi sebagian besar belum ada perubahan. Jadi penanganannya cukup demokratis sebenarnya.
7. Apakah ada bentuk pranata social(norma-norma) di Taka Bonerate dalam penangkapan hasil laut?
 Kalau adat tidak ada.
8. Bagaimana bentuk tradisi sosial di TN Taka Bonerate dalam penangkapan hasil laut?
 Kalau selama ini tidak ada saya liat.
9. Apakah menggunakan kompressor dan bom sudah menjadi tradisi di TN Taka Bonerate?
 Kalau menjadi tradisi sebenarnya bukan tapi bom dan bius sudah ada sebelum dibentuknya Taman Nasional tapi selama ini sudah ada perubahan walaupun tidak signifikan. Sudah dari dulu.
10. Bagaimana sejarah penggunaan kompressor dan bom di TN Taka Bonerate?
 Sudah ada dari dulu
11. Bagaimana dinamika dan perubahan penggunaan kompressor dan bom di TN

Taka Bonerate?

Kebanyakan dari nelayan dari luar kawasan yang menggunakan. Kadang memang perubahannya kadang naik dan turun. Untuk pelaku Bom dari dalam kawasan saat ini sudah berkurang walaupun belum habis.

12. Apa penyebab munculnya konflik tentang penggunaan kompressor?
Adanya nelayan yang ingin mendapatkan hasil yang lebih. Para pelaku kompressor kebanyakn memasuki wilayah nelayan tradisional, menggangu nelayan local.
13. Bagaimana cara masing-masing konflik diselesaikan melalui mekanisme birokrasi yang berjalan saat itu?
 Sampai saat ini terkait sudah beberapa cara yang dilakukan yakni dengan dialog yang dimediasi oleh Pemda namun dari pelaku tetap memaksakan pekerjaannya yang tidak ramah lingkungan dibandingkan beralih ke alat tangkap yang ramah lingkungan. Jadi kalau kita penuhi permintaan dari pelaku sama saja dengan melanggar aturan.
14. Kebijakan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan konflik kompressor/bom?
 Untuk nelayan didalam kawasan diberikan bantuan nelayan walaupun belum semua tapi kami prioritaskan dulu nelayan yang melakukan kegiatan illegal. Harapannya kedepannya bisa berubah. Kami fokus masyarakat didalam kawasan.
15. Apakah kebijakan itu bertentangan dengan pihak nelayan?
 Kalau pemberian bantuan tidak bertentangan dengan nelayan.
16. Apa saja regulasi/aturan yang terkait dengan konflik tersebut?
 Undang-undang perikanan no 45 tahun 2009 tentang perikanan
17. Apakah ada instansi pemerintah yang terlibat dalam konflik?
 Selama ini ada namun untuk tindak lanjutnya sampai penyelesaian konflik belum maksimal.
18. Siapa saja mitra Balai TN Taka Bonerate dalam penanganan konflik?
 Dinas Perikanan, Polres, Kejaksaan, Pengawas perikanan(PSDKP) dan NGO.
19. Bagaimana metode yang digunakan oleh Balai TN Taka Bonerate beserta mitra dalam menangani dan/atau menahan konflik agar tidak meluas dan menjadi perhatian kritis masyarakat luas?
20. Bagaimana strategi yang digunakan oleh Balai TN Taka Bonerate beserta mitra dalam menangani dan/atau menahan konflik agar tidak meluas dan menjadi perhatian kritis masyarakat luas?
 komunikasi dan melakukan pendekatan bagi masyarakat yang terindikasi melakukan pelanggaran.
21. Apa saja kepentingan utama pemerintah/Balai TN Taka Bonerate terkait dengan konflik?
 Pihak Balai ingin menyelesaikan konflik yang ada agar pengelolaan TN tetap berhasil. Bertindak sebagai dokter, disaat masyarakat didalam kawasan mengalami kendala/masalah maka disitu pihak Balai akan melakukan penyelesaian konflik. Sampai saat ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap balai dibandingkan dengan instansi lain yah 90%.
22. Siapa saja pihak-pihak yang mendukung pemerintah dalam penanganan konflik?

Dinas Perikanan, Polres, Kejaksaan, Pengawas perikanan(PSDKP) dan NGO.

23. Bagaimana mekanisme kerjasamanya?
melakukan koordinasi, forum, piagam untuk menyelesaikan konflik di masyarakat namun selama ini belum ditindak lanjuti secara maksimal. Jadi konflik yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cepat dapat terjadi secara berulang.
24. Apakah ada keterlibatan pihak ketiga didalam konflik?
Ada
25. Siapa Yang menunggangi dan untuk apa?
para pelaku usaha yang berhubungan dengan pengguna compressor. Bila dilakukan penindakan maka selaku pemodal akan rugi. Jadi pemodal tetap berusaha agar usagahnya tetap berjalan walaupun usahannya bertentangan dengan aturan. Dengan adanya dukungan dari pemodal dan pihak lain maka konflik seperti ini akan susah dihentikan karena banyak orang yang mencari keuntungan dari si pihak nelayan ini.
26. Siapa saja para aktor di pihak nelayan?
Pemodal
27. Siapa saja mitra/koalisi di pihak nelayan?
Mitra pihak nelayan adalah pemodal, banyak juga mitranya tapi tidak kelihatan.
28. Siapa mediator didalam konflik?
Legislatur(DPRD), Bupati dan Pemda.
29. Apa kepentingannya dalam menjadi mediator?
Seseorang yang menjadi mediator ingin mendapatkan nama baik dari pihak nelayan yang dia mediasi. Untuk tujuan politik, pribadi dan ekonomi perorangan.
30. Apakah mediator menjadikan laten atau manifest?
Dengan adanya mediator namun sampai sekarang kebanyakn mediator hanya bertujuan untuk kepentingan pribadi. Jadi konflik tidak terselesaikan dengan baik, jadi Laten.
31. Kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh pengelola dalam pencegahan konflik?
Sosialisasi
32. Kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh pengelola dalam penanganan konflik?
Pembinaan dan penegakan hukum. Namun sekarang yang menjadi kendala adalah pihak penegak hukum tidak dalam melihat aturan dari kompresor ini berbeda pandangan/persepsi terkait Undang-undang perikanan tersebut. Sebagian penegak hukum yang melihat harus ada dampak yang ditimbulkan.
33. Kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh pengelola dalam pemulihan pasca konflik?
Konfliknya masih berkelanjutan, konfliknya tidak selesai. Seandainya penegak hukum memiliki pandangan yang sama maka konflik bisa diselesaikan.
34. Apakah kegiatan penanganan konflik telah tepat sasaran terhadap yang berkonflik?
Kalau mengacu ke aturan sudah tepat sasaran namun pelaku mencari dukungan dari luar agar kegiatannya tetap bisa berjalan.

35. Apakah kegiatan penanganan konflik dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat?
Kalau bagi masyarakat secara umum iya karena masyarakat tradisional didalam kawasan akan aman dan tenang dengan tidak adanya penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Namun bagi masyarakat yang pengguna alat tangkap tidak ramah lingkungan akan dirugikan tapi sudah ada juga nelayan yang sudah berubah.
36. Apakah kegiatan penanganan konfliknya berhasil meredam konflik?
Selama ini bisa meredam tapi tidak berlangsung lama
37. Jika berhasil, mengapa?
karena tingkat penindakan penanganan konflik tidak menghasilkan status konflik yang final sehingga pola penanganan konflik yang selama ini dilakukan dengan pembinaan **tidak memberikan efek jera** bagi pelaku. Juga adanya dukungan dari pihak lain yang mendukung pelaku. **Proses hukumnya tidak maksimal sehingga konflik ini berulang dan berulang terus.**
38. Jika tidak berhasil mengapa?
-
39. Apa kendala dalam penanganan konflik yang telah dilakukan?
Adanya politik kepentingan dan proses hukum yang tidak maksimal.

Lampiran 19 : Hasil wawancara 12, pihak pengelola
 Nama : Agusriadi, S. H
 Umur : 42 Tahun
 Pekerjaan : ASN
 Jabatan : Polhut TN Taka Bonerate

1. Bagaimana pandangan anda tentang kawasan TN Taka Bonerate bagi masyarakat nelayan?
 Nelayan sangat memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya alam di kawasan TN Taka Boenarate, termasuk masyarakat dari luar kawasan. Karena mudah dalam penangkapan ikannya didalam kawasan.
2. Apa saja jenis-jenis konflik pengelolaan di TN Taka Bonerate antara pihak Balai dengan nelayan pada tahun 2017-2022?
 Selain Bom, pengguna compressor dari luar kawasan, Gae(pukat harimau) tapi yang dominan compressor.
3. Mengapa penggunaan alat bantu kompressor dilarang didalam kawasan TN Taka Bonerate?
 Dilarang didalam UU Perikanan untuk alat bantu penangkapan ikan, dilarang didalam kawasan karena penggunaan didalam kawasan terdapat beberapa alat tangkap seperti Bom dan bius. Jadi untuk mewanti-wanti agar tidak terjadi penggunaan alat bom dan bius.
4. Apa manfaat kawasan TN Taka Bonerate secara ekonomi politik global? karena kelimpahan ikannya yang sangat tinggi dan ketergantungan masyarakat diluar kawasan juga tinggi.
5. Adakah instrument/alat global saat ini yang mendorong mediasi konflik?
 -
6. Bagaimana sistem pemerintahan melakukan penanganan detruktive fishing khususnya Kompressor. Apakah demokratis atau otoriter, Jelaskan?
 Cenderung demokratis karena bila ada masalah yang tidak terpecahkan dilapangan maka dilakukan diskusi di DPRD.
7. Apakah ada bentuk pranata social(norma-norma) di Taka Bonerate dalam penangkapan hasil laut?
 Secara tertulis tidak ada, tapi kayak budaya masih ada. Masih banyak yang menggunakan alat sederhana dan anti terhadap penangkapan yang berlebihan. Contoh, Lampara di Pasitallu tengah yang bekerja saat di bulan gelap, tidak mencari disaat bulan terang/purnama dan kebanyakan nelayannya dari perempuan.
8. Bagaimana bentuk tradisi sosial di TN Taka Bonerate dalam penangkapan hasil laut?
 -
9. Apakah menggunakan kompressor dan bom sudah menjadi tradisi di TN Taka Bonerate?
 Lampara di Pasitallu tengah yang bekerja saat di bulan gelap, tidak mencari disaat bulan terang/purnama dan kebanyakan nelayannya dari perempuan.
10. Bagaimana sejarah penggunaan kompressor dan bom di TN Taka Bonerate?
 Bukan tradisi tapi sudah ada sebelum TN Taka Bonerate dibentuk.
11. Bagaimana dinamika dan perubahan penggunaan kompressor dan bom di TN Taka Bonerate?
 Kalau didalam kawasan ada penurunan yang signifikan. Sekarang yang jadi

polemic adalah nelayan dari luar kawasan yang menggunakan compressor dari pulau Kayuadi. Mereka juga ada beberapa juragan dan persaingan, pernah mereka masuk sampai 15 Kapal saat itu yang agak susah dihalau karena terlalu banyak.

12. Apa penyebab munculnya konflik tentang penggunaan kompresor?
Gara-gara nelayan pemancing dengan penyelam. Nelayan pemancing yang kemana-mana termasuk ke wilayah pemancing. Mereka kadang tidak mau ditegur sehingga terjadilah konflik antara penyelam dan pemancing.
13. Bagaimana cara masing-masing konflik diselesaikan melalui mekanisme birokrasi yang berjalan saat itu?
Dirembukkan dengan berbagai pihak dan setelah itu dilakukan sosialisasi. Sosialisasi di daerah penyangga termasuk kayuadi bersama Pak Camat, tahun 2020-2021.
14. Kebijakan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan konflik kompresor/bom?
Ada wacana terkait penanganan konflik ini akan diberikan lokasi bagi penyelam namun terjadi juga pro-kontra dengan masyarakat didalam kawasan. Jadi kami tetap melarang didalam kawasan, diusahakan diluar kawasan.
15. Apakah kebijakan itu bertentangan dengan pihak nelayan?
Sebenarnya mereka menerima juga karena amanat Undang-undang.
16. Apa saja regulasi/aturan yang terkait dengan konflik tersebut?
Piagam Pa'jukukang hasil dari pertemuan unsur muspida yang mendeklarasikan bahwa kompresor dilarang didalam kawasan. Setelah itu muncul inisiasi DF di Desa Tarupa yang dihadiri oleh semua Kepala Desa di dalam kawasan. Hal itu diinisiasi oleh WCS dan PSDKP.
17. Apakah ada instansi pemerintah yang terlibat dalam konflik?
Ada beberapa oknum yang ikut diperputaran kasus tersebut. Pernah ada Oknum dari AL, POL Air, Polsek. Jadi nelayan dari dalam kawasan masih berani masuk ke dalam kawasan karena ada oknum yang memback up mereka.
18. Siapa saja mitra Balai TN Taka Bonerate dalam penanganan konflik?
Baharkam(POLDA) tapi cenderung ke Handak(Bom ikan)
19. Bagaimana metode yang digunakan oleh Balai TN Taka Bonerate beserta mitra dalam menangani dan/atau menahan konflik agar tidak meluas dan menjadi perhatian kritis masyarakat luas?
Teman-teman dilapangan cenderung persuasive jadi kami lebih anjungsana ke warga/tokoh masyarakat menjelaskan apa/kenapa dilarang.
20. Bagaimana strategi yang digunakan oleh Balai TN Taka Bonerate beserta mitra dalam menangani dan/atau menahan konflik agar tidak meluas dan menjadi perhatian kritis masyarakat luas?
-
21. Apa saja kepentingan utama pemerintah/Balai TN Taka Bonerate terkait dengan konflik?
Agar pengelolaan TN kedepan berjalan lancar dilapangan, bebas dari aktifitas DF dan kompresor.
22. Siapa saja pihak-pihak yang mendukung pemerintah dalam penanganan konflik?
Polres, Kodim, Pemda, PSDKP(perikanan pusat) dan NGO.

23. Bagaimana mekanisme kerjasamanya?
Mekanisme kerjasamanya cenderung ke Aksi. Melalui Piagam Pa'jukukang, dilapang bila ditemui masalah maka akan dikomunikasikan dengan Binmas/Binsa dilapangan.
24. Apakah ada keterlibatan pihak ketiga didalam konflik?
Pihak ketiga, ada beberapa oknum yang terlibat didalam perputaran DF.
25. Siapa Yang menunggangi dan untuk apa?
Jadi nelayan yang di Back Up oleh Oknum AL, Polair dan Polsek. Tujuannya lebih ke pribadi.
26. Siapa saja para aktor di pihak nelayan?
Nelayan dari luar kawasan H Mangung, Wahid, dan Sado.
27. Siapa saja mitra/koalisi di pihak nelayan?
Ada dari LSM, ada juga dari anggota dewan(legislatif) bila ada masalah.
28. Siapa mediator didalam konflik?
Bupati sendiri yang langsung pimpin di DPRD. Notulensi di DPRD
29. Apa kepentingannya dalam menjadi mediator?
Membela nelayan agar masyarakat tidak dirugikan dan tidak berbenturan dengan Undang-undang.
30. Apakah mediator menjadikan laten atau manifest?
Pasca mediasi sedikit-sedikit menurun karena adanya Bupati yang langsung memberikan solusi. Peranan Bupati besar dan menyarankan agar tidak menggunakan dulu compressor sampai ditemukan solusi terbaik. **Responden Hadir saat pertemuan di DPRD.**
31. Kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh pengelola dalam pencegahan konflik?
Lebih cenderung ke anjungsana, preventif(patrol), Sosialisasi terkait aturan yang berlaku. Waktu deklrasi DF di Tarupa ada beberapa eks pelaku yang menyerahkan sisa-sisa handak yang menyerahkan ke petugas.
32. Kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh pengelola dalam penanganan konflik?
-
33. Kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh pengelola dalam pemulihan pasca konflik?
-
34. Apakah kegiatan penanganan konflik telah tepat sasaran terhadap yang berkonflik?
Sudah tepat menurut saya karena di dalam kawasan hanya ada 2 permasalahan yakni Handak dan compressor.
35. Apakah kegiatan penanganan konflik dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat?
Iya.. nelayan pemancing mendapatkan hasil yang berlebih setelah tidak adanya nelayan kompresor.
36. Apakah kegiatan penanganan konfliknya berhasil meredam konflik?
Berhasil meredam konflik, setelah nelayan compressor maka nelayan pemancing bisa mendapatkan hasil 2 sampai 3 kali lipat hasilnya.
37. Jika berhasil, mengapa?
Hasil tangkapan nelayan tradisional lebih banyak
38. Jika tidak berhasil mengapa?

-
39. Apa kendala dalam penanganan konflik yang telah dilakukan?
Terkadang belum ada titik temu dalam penerapan pasal dalam menangani pasal tersebut. Ketika menggunakan undang-undang perikanan maka bukan ranahnya kita, kita lebih ke undang-undang konservasi. Belum ada titik temu antara penyidik dan petugas lapangan, ketika kasus kopressor maka cuman sanksi administrasi kecuali ada handaknya maka bisa diproses dengan Undang-undang tentang handak(bom).